



SKRIPSI

Judul:

Urgensi Penyelarasan Kepastian Hukum Atas Keberatan
Putusan Arbitrase BPSK

Disusun oleh:

DAVID PRAWIRA

NIM. 205210168

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**URGENSI PENYELARASAN KEPASTIAN HUKUM ATAS
KEBERATAN PUTUSAN ARBITRASE BPSK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun oleh:

Nama : David Prawira

NIM : 205210168

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025**

Pengesahan

Nama : DAVID PRAWIRA
NIM : 205210168
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Urgensi Penyelarasan Kepastian Hukum Atas Keberatan
Putusan Arbitrase BPSK
Title : Urgency of Harmonizing Legal Certainty on Objections to
BPSK Arbitration Award

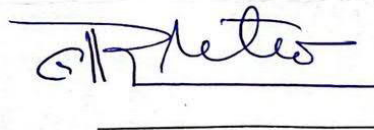
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 13-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. IDA KURNIA, S.H., M.H., Dr.
2. R. M. GATOT P. SOEMARTONO, SE.,SH.,MM.,LLM, Dr.
3. YUWONO PRIANTO, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
R. M. GATOT P. SOEMARTONO,
SE.,SH.,MM.,LLM, Dr.
NIK/NIP: 10289008



Jakarta, 13-Januari-2025
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

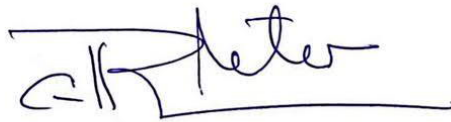
Persetujuan

Nama : DAVID PRAWIRA
NIM : 205210168
Program Studi : HUKUM
Judul : Urgensi Penyelarasan Kepastian Hukum Atas Keberatan
Putusan Arbitrase BPSK

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 02-Januari-2025

Pembimbing:
R. M. GATOT P. SOEMARTONO,
SE.,SH.,MM.,LLM, Dr.
NIK/NIP: 10289008



ABSTRAK

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga yang diberikan tanggung jawab dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. BPSK menawarkan tiga mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu arbitrase, konsiliasi, dan mediasi. Di antara ketiga pilihan tersebut, arbitrase menjadi pilihan utama karena putusannya bersifat final dan mengikat. Namun, dalam praktiknya, terdapat celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase BPSK, sehingga mereka mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini menyebabkan konsumen sering kali kesulitan dalam mendapatkan kepastian hukum saat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase BPSK, yang tercermin dari banyaknya pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulannya, perlu adanya upaya penyesuaian untuk meningkatkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase BPSK. Revisi terhadap undang-undang perlindungan konsumen diharapkan dapat memperkuat sifat mengikat putusan arbitrase BPSK dan memastikan penyelesaian sengketa konsumen yang lebih efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kepastian Hukum, Arbitrase, BPSK.

ABSTRACT

The Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) is tasked with the authority to resolve consumer disputes under the Consumer Protection Law. BPSK offers three mechanisms for dispute resolution: arbitration, conciliation, and mediation. Among these options, arbitration is preferred due to its final and binding nature. However, in practice, legal loopholes exist that allow dissatisfied parties to challenge BPSK's arbitration decisions in the District Court. This often leaves consumers struggling to achieve legal certainty when resolving their disputes through BPSK arbitration, as evidenced by the frequent annulments of BPSK arbitration decisions by the courts. This research employs a normative legal research methodology. The findings highlight the need for efforts to enhance legal certainty in the resolution of consumer disputes through BPSK arbitration. Revising the Consumer Protection Law is recommended to strengthen the binding nature of BPSK arbitration decisions and to ensure a more effective dispute resolution process for consumers.

Keywords: Consumer Protection, Legal Certainty, Arbitration, BPSK.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena oleh karena kasih karunia dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Urgensi Penyelarasan Kepastian Hukum Atas Keberatan Putusan Arbitrase BPSK**”. Skripsi ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis perhatikan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan, bimbingan, serta arahan yang diberikan kepada penulis. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.Kn., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M, selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Univesitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan dengan sabar membimbing serta memberikan ilmunya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Eka Erfianty Putri, S.H., CPM., CPArb., CPCLE., selaku praktisi dan akademisi pada lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Majelis BPSK Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2022-2027 yang sudah memberikan masukan untuk pemenuhan data dalam penulisan ini;

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama proses perkuliahan;
8. Orang Tua tercinta, kakak dan adik yang terkasihi, dan Ghaniyyah Zenasyamsaman yang tiada henti dalam memberikan dukungan, semangat, dan doa bagi penulis;
9. Sahabat seperjuangan Jonathan Rikomono, Patrick Winson Salim, John Michael Hizkia, Denis Syaputra, Sota James Sakila, Dita Saraswati, dan Nathanael Telaumbanua yang telah banyak membantu penulis, memberikan masukan-masukan dan motivasi;
10. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang sudah memberikan pengalaman berorganisasi kepada saya;
11. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Battle of Speech yang sudah memberikan banyak pengalaman serta ilmu hukum kepada saya; dan
12. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu, terima kasih atas segala dukungan doa dan semangat untuk penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini tepat pada waktunya.

Dengan penyusunan skripsi ini, besar harapan penulis skripsi agar setiap hal yang tertulis dapat bermanfaat bagi banyak pihak khususnya bagi penulis sendiri, masyarakat, praktisi hukum, dan akademisi hukum pada umumnya.

Jakarta, 03 Januari 2025

Penulis



David Prawira

Pernyataan

Nama : DAVID PRAWIRA
NIM : 205210168
Program Studi : HUKUM
Judul : Urgensi Penyelarasan Kepastian Hukum Atas Keberatan
Putusan Arbitrase BPSK

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 02-Januari-2025
Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "1000 RUPIAH", "METERAI TEMPEL", and a serial number "620DCAMX032762274".

DAVID PRAWIRA
NIM. 205210168

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan	ii
Persetujuan	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	vi
Pernyataan	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Singkatan	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual	13
E. Metode Penelitian	22
F. Sistematika Penulisan	27
BAB II KERANGKA TEORETIS	29
A. Teori Hukum Bisnis	29
B. Teori Perlindungan Konsumen	30

C. Teori Arbitrase	34
D. Teori Omnibuslaw	37
E. Teori Kepastian Hukum	40
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	42
A. Pembatalan Putusan Arbitrase BPSK oleh Pengadilan Negeri	42
B. Hasil Wawancara	44
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	48
A. Legitimasi Final dan Mengikatnya Putusan Arbitrase oleh BPSK..	48
B. Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK	54
BAB V PENUTUP	79
Daftar Pustaka	80
Lampiran	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	:	Bagan Kerangka Konseptual.....	13
----------	---	--------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

UU AAPS	: Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen
APS	: Alternatif Penyelesaian Sengketa
PT	: Perseroan Terbatas
BPSK	: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
PN	: Pengadilan Negeri
MA	: Mahkamah Agung
Perma	: Peraturan Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	:	Keputusan Dekan Tentang Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	:	Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	:	Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 5	:	Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran 6	:	Surat Keterangan Turnitin Jurnal
Lampiran 7	:	Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran 8	:	<i>Letter of Acceptance</i> (LOA) Sinta 3
Lampiran 9	:	Bukti Publikasi Jurnal
Lampiran 10	:	Surat Permohonan Wawancara dengan BPSK